

**Judul** : Memblokir facebook bukan solusi tepat  
**Tanggal** : Rabu, 11 April 2018  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

## Memblokir Facebook bukan Solusi Tepat

RENCANA pemerintah memblokir situs media sosial Facebook gara-gara kebocoran data pengguna mendapat tentangan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo. Tindakan tersebut tidak solutif selain juga akan menimbulkan masalah baru.

"Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya. *Impact* yang ditimbulkan justru kurang baik," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/4).

Dia meminta pemerintah untuk tidak asal blokir. "Harus fokus ke *win-win solution*," katanya.

Alasannya, kata lelaki yang akrab dipanggil Bamsoet tersebut, Facebook sudah memberi banyak manfaat untuk masyarakat. Banyak UMKM dan unit usaha kecil lainnya yang bertumpu pada media sosial ciptaan Mark Zuckerberg tersebut. Masyarakat membuat 'lapak' digital untuk melakukan transaksi dari komoditas yang terdekat dengan mereka.

"Di saat negara belum bisa memberikannya, Facebook sejak awal sudah mampu memberikan 'marketplace' sederhana untuk rakyat mengembangkan usaha. Mereka tak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana. Masak semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data?" katanya.

Bamsoet mengakui, saat ini sudah banyak pilihan *marketplace* di Indonesia. Transaksi juga jauh lebih aman daripada Facebook yang cuma sekadar media sosial. "Tapi dengan populasi pengguna Facebook di Indonesia yang begitu besar, sekitar 130 juta akun atau 6% dari *user* global, UMKM tidak akan pernah bisa meninggalkan Facebook sepenuhnya karena dia sudah menjadi pusat aktivitas digital masyarakat," katanya.

Bamsoet mengakui bahwa persoalan kebocoran data pengguna adalah masalah serius, dan Facebook selama ini tak pernah transparan. Baru setelah data pengguna bocor dan



ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica, praktik tak terpuji Facebook selama ini terbongkar.

"Tapi kita juga harus tetap mendudukan persoalan. Data seperti apa sih yang bocor itu? Data pengguna yang bocor bukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), foto-foto, atau *chat log*. Yang bocor adalah data yang memang sudah disetel untuk publik," katanya.

Meskipun begitu, kata Bamsoet, semua data tersebut tetap privat, dan Facebook tidak bisa serta-merta mengambilnya untuk kepentingan di luar persetujuan pengguna langsung. "Ini yang harus kita permasalahkan dan minta pertanggungjawabannya kepada Facebook."

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh bersama dengan Komisi I DPR RI mengatakan banyak pengguna seluler di Indonesia yang memiliki lebih dari 5 nomor telepon seluler (ponsel).

Data yang dimilikinya menunjukkan bahwa satu NIK untuk 1 nomor ponsel digunakan

84 juta pengguna. Berikutnya satu NIK untuk 2 nomor ponsel digunakan oleh 34 juta pengguna. Satu NIK untuk 3 nomor ponsel digunakan oleh 11 juta pengguna.

Satu NIK untuk 4 nomor ponsel digunakan oleh 5 juta pengguna. Sementara satu NIK untuk 5-10 nomor ponsel digunakan oleh 4 juta pengguna. Satu NIK untuk lebih dari 10 nomor ponsel digunakan oleh 222 ribu pengguna.

"Ternyata banyak di Indonesia yang memiliki ponsel lebih dari 5. Ini yang mau saya sampaikan dan menjadi konsersn kita bersama bahwa sistem keamanan nasional harus kita bangun bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas operator, gerai dan juga masyarakat karena kami di Dukcapil menemukan sesuatu yang menurut kami ekstrem. Satu NIK memiliki lebih dari 2 juta nomor. Ini perlu perlakuan dari kita semua bahwa ada perilaku anomali," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/4).

Pihaknya sempat mendalami hal ini dengan menyam-

mar sebagai pembeli nomor kartu prabayar dan mengetahui bahwa satu NIK untuk mendaftar banyak nomor itu salah satu alasannya karena untuk menjaga agar nomor ponsel-nya tidak mati. Ia juga sudah menyampaikan hal ini kepada masing-masing operator telpon seluler. Kesepakatannya waktu itu, sambung Zudan, nomor-nomor tersebut harus didaftarkan ulang.

"Mereka harus meng-*unreg* nomor yang sudah didaftarkan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, Dukcapil menyediakan NIK dan nomor KK. Tidak bisa dibuka NIK dan nomor KK itu isi di dalamnya, nama, alamat dan seterusnya. Hanya bisa dibuka oleh Dirjen Dukcapil. Inilah bagaimana kami menyusun sistem dalam rangka membangun keamanan nasional berbasis data kependudukan untuk mengetahui siapa pemilik nomor itu secara lebih nyata dan konkret dan tidak bisa lagi dibohongi bahwa yang terdaftar itu bukan orang yang berhak. Tujuan kita ke sana," tandasnya. (S-25)